



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sgm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**M\*\*\* N\*\*\*\* bin R\*\*\*\***, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sgm., tanggal 10 Juli 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\*, umur 17 tahun (lahir tanggal 18 Maret 2000), agama Islam, pekerjaan supir taksi online (Go Car) alamat XXX, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*, umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak yang bernama W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahkannya,

*Hal. 1 dari 10 Pen No. 132/Pdt.P/2017/PA Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun) dan PPN Kecamatan setempat menolak menikahkannya, oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* untuk bisa dinikahkan dengan D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\*;

4. Bahwa antara W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* dengan D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada lelaki bernama W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* untuk menikah dengan perempuan yang bernama D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\*;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada

Hal. 2 dari 10 Pen Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* dan calon istrinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306082511130001 atas nama Muh. Nasir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gowa, tertanggal 24 Mei 2017, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, Hawatiah Dg. Bau binti Dg. Sodeng, umur 49 tahun, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* adalah anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* dengan perempuan yang bernama D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\*;
  - Bahwa W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* dengan perempuan D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
  - Bahwa Pemohon sudah melamar D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* kepada orang tuanya bahkan pihak keluarga sudah mendesak agar Wais Al Karni segera menikahi D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\*;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab,

Hal. 3 dari 10 Pen Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sgm



semenda dan sesusuan ataupun halangan pekawinan lainnya menurut hukum Islam;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh serta telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;
- Bahwa D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* selaku calon istri W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* telah mampu bertindak sebagai ibu rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

2. Saksi Kedua, Muh. Rizal bin H. Rabani, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muh. Nasir dan Wais Al Karni adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* dengan perempuan yang bernama D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\*, akan tetapi kehendaknya tersebut belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* dengan perempuan D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* kepada orang tuanya bahkan pihak keluarga sudah mendesak agar Wais Al Karni segera menikahi Debi Nuraini;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan pekawinan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah

*Hal. 4 dari 10 Pen Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat dewasa/baligh serta telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;

- Bahwa D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* selaku calon istri W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* telah mampu bertindak sebagai ibu rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 17 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya serta calon istri anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* telah melamar D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* kepada orang tuanya D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\*,

Hal. 5 dari 10 Pen Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam bukti P dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\* mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu H\*\*\*\*\* Dg. B\*\*\* binti Dg.S\*\*\*\*\* dan M\*\*\* R\*\*\*\* bin H. R\*\*\*\*, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon istri anak Pemohon telah siap berumah tangga bersama anak Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Pen Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan perempuan bernama D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* telah menerima lamaran anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan perempuan bernama D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\* tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah

Hal. 7 dari 10 Pen Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana

*Hal. 8 dari 10 Pen Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon pada usia 17 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, W\*\*\*\* A\* K\*\*\*\* bin M\*\*\* N\*\*\*\* untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, D\*\*\*\* N\*\*\*\* binti A. M\*\*\*\*\*;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh: **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI.**,

Hal. 9 dari 10 Pen Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andi Tenri, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd

ttd

**Uten Tahir, S.HI., M.H.**

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Andi Tenri, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10 Pen Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)